



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029

**DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI**



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 26 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Bupati adalah Bupati Seruyan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seruyan.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
19. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
20. Menteri adalah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

21. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - l. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - m. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- x. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
- dd. Kecamatan Seruyan Hilir;
- ee. Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- ff. Kecamatan Danau Sembuluh;
- gg. Kecamatan Seruyan Raya;
- hh. Kecamatan Danau Seluluk;
- ii. Kecamatan Hanau;
- jj. Kecamatan Batu Ampar;
- kk. Kecamatan Seruyan Tengah;
- ll. Kecamatan Seruyan Hulu; dan
- mm. Kecamatan Suling Tambun.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
- BAB V : PENUTUP.

- (2) Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap berakhirnya Tahun Anggaran dan setelah berakhirnya Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Apabila dalam hal pelaksanaan RPJMD mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah juga harus mengikuti perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI SERUYAN,



AHMAD SELANORWANDA

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 September 2025

**PL. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**



SAHRUN ABBAS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR ...!

26

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024-2026

Perangkat Daerah : j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan berkat Rahmat dan Pertolongan-Nya, maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dapat disusun.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua Bidang dalam Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan yang telah membantu sehingga tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

Sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menegaskan bahwa Bupati/Wali Kota Bersama DPRD untuk segera menyusun dan membahas RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta Bupati/Walikota memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029. Bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai Unsur Pemangku Kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Kami menyadari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 yang disusun ini masih jauh dari sempurna sehingga masukan dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaannya. Semoga Rencana Strategis (Renstra) ini dapat bermanfaat sebagai acuan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	33
2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	34
2.6 Isu Strategis	35
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
3.1 Tujuan	47
3.2 Sasaran	48
3.3 Strategi	49
3.4 Arah Kebijakan	52
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	58
4.1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan	66
4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan RENSTRA PD Pemerintah Kabupaten Seruyan	68
4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029	93
4.4 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan	130
4.5 Indikator Kinerja Utama RENSTRA PD Pemerintah Kabupaten Seruyan	131
4.6 Indikator Kinerja Kunci RENSTRA Pemerintah Kabupaten Seruyan	132
BAB V PENUTUP	133

DAFTAR LAMPIRAN / TABEL

1. Tabel 2.1.1 : Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan
2. Tabel 2.1 : Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan
3. Tabel 2.2 : Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4. Tabel 3.3 : Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD Pemerintah Kabupaten Seruyan
5. Tabel 4.1 : Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan
6. Tabel 4.2 : Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan RENSTRA PD Pemerintah Kabupaten Seruyan
7. Tabel 4.3 : Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029
8. Tabel 4.4 : Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan
9. Tabel 4.5 : Indikator Kinerja Utama RENSTRA PD Pemerintah Kabupaten Seruyan
10. Tabel 4.6 : Indikator Kinerja Kunci RENSTRA Pemerintah Kabupaten Seruyan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi Demografi kependudukan Kabupaten Seruyan yang mempunyai luas $\pm 16.404 \text{ Km}^2$ berpenduduk sebesar 174.310 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 92.050 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 82.270 jiwa, (BPS:2024). Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Seruyan menurut data kecamatan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Seruyan, pada Kecamatan Seruyan Hilir berjumlah sebanyak 40.540 jiwa, Kecamatan Seruyan Hilir Timur sebanyak 10.530 jiwa, Kecamatan Danau Sembuluh sebanyak 15.390 jiwa, Kecamatan Seruyan Raya sebanyak 19.950 jiwa, Kecamatan Hanau sebanyak 22.190 jiwa, Kecamatan Danau Seluluk sebanyak 18.440 jiwa, Kecamatan Seruyan Tengah sebanyak 25.320 jiwa, Kecamatan Batu Ampar sebanyak 9.830 jiwa, Kecamatan Seruyan Hulu sebanyak 9.350 jiwa dan Kecamatan Suling Tambun sebanyak 2.790 jiwa. Oleh karenanya bila dilihat dari besarnya potensi ekonomi berupa kekayaan alam, maka tampak bahwa faktor penyebaran penduduk kurang menguntungkan, sehingga belum dapat memanfaatkan potensi diri dan potensi tanah air yang di miliki bersama untuk menyejahterakan bangsa. Kesenjangan disebabkan Karena belum tergali secara maksimal potensi kekayaan alam secara efektif dan efisien bagi kepentingan bersama.

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian merupakan salah satu bagian yang harus ditangani oleh Pemerintah Daerah yang mana didalam pelaksanaannya ditemukan banyak permasalahan yang cukup kompleks seperti tingkat pengangguran yang cukup tinggi, kualitas dan ketrampilan tenaga kerja yang belum mampu memenuhi kebutuhan yang disyaratkan oleh pasar kerja, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja belum berjalan secara harmonis yang ditandai masih terjadinya perselisihan

hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja dan mogok kerja. Sementara di bidang ketrasmigrasian masih terlihat tidak meratanya persebaran penduduk yang berakibat kesenjangan tingkat kesejahteraan penduduk, ketidakseimbangan lingkungan hidup dan ekosistem alam sehingga perlu penataan persebaran penduduk melalui pengurangan mobilitas penduduk, pengembangan dan pemberdayaan kawasan.

Dalam rangka untuk mendorong dan mensinkronkan pembangunan ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian selama 5 (lima) Tahun ke depan (2025-2029), serta menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan menyusun Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah Kebijakan serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu lima Tahun. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) dimana dalam penyusunan Renstra ini harus sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, berpedoman kepada RPJMD serta bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan juga merupakan acuan, arahan kebijakan dan strategi pembangunan ketenagakerjaan dan

ketransmigrasian dalam menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

- 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
 9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan

- Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);
 27. Peraturan Bupati Seruyan nomor 28 tahun 2025 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan adalah tersedianya dokumen perencanaan lima Tahunan sebagai arah kebijakan pembangunan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan selama 5 Tahun terakhir pada periode pembangunan yang lalu;
- Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan selama 5 Tahun mendatang;
- Menjabarkan visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029 kedalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
- Menetapkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan yang disertai pendanaan indikatif selama 5 Tahun mendatang;
- Menetapkan kinerja penyelenggara bidang urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan selama 5 Tahun mendatang;
- Menyediakan panduan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan.
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap Tahun anggaran selama 5 Tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan;

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SERUYAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi;
- 2.2. Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan;
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan;
- 2.5. Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan;
- 2.6. Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan;
- 3.2. Sasaran;
- 3.3. Strategi;
- 3.4. Arah Kebijakan;

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SERUYAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan yang mempunyai Tugas dan Fungsi sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan yang bertugas melaksanakan kebijakan operasional ketenagakerjaan dan transmigrasi. Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan, tidak terlepas dari kerjasama yang baik antar sesama personil juga koordinasi yang dilaksanakan oleh pimpinan Instansi sebagai penanggung jawab semua kegiatan yang ada. Tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok:

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan mempunyai tugas menyelenggarakan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana tenaga kerja;
- b. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi
- c. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- d. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
- e. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil;
- f. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah;
- g. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten;

- h. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dalam 1 (Satu) Daerah;
- i. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
- j. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah;
- k. Penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- l. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah
- m. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah
- n. Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
- o. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah
- p. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian

c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan, Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi:
 - 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- c. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja;

- e. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- f. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPTD.

Adapun uraian tugas sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan, mengkoordinasikan, menetapkan serta menyelenggarakan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta bertanggung jawab atas terlaksanya tugas dan fungsi Dinas.

Adapun uraian pelaksanaan tugas sebagai berikut:

- a. perumusan dan penetapan rencana kebijakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
- d. penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Dinas serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Dinas.

Adapun uraian pelaksanaan tugas sebagai berikut:

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Sekretariat;
- b. pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dinas;
- c. pengoordinasian administrasi keuangan dinas;
- d. pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah dinas;
- e. pengoordinasian Administrasi Kepegawaian dinas;
- f. pengoordinasian Administrasi Umum dinas;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan dinas;
- h. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan dinas;
- i. pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan dinas;
- j. pengoordinasian Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas;
- k. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

2.1 Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- b. melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas;
- c. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas;

- d. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran/Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Dinas;
- e. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- f. menyiapkan bahan evaluasi kinerja Dinas;
- g. melaksanakan Administrasi Keuangan Dinas;
- h. melaksanakan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas;
- i. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

2.2 Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan Administrasi Umum Dinas;
- c. melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas;
- d. melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas;
- e. melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
- f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Bidang hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan melaksanakan, mengevaluasi kegiatan bidang

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- b. pengevaluasi pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah;
- c. pengkoordinasian Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah;
- d. pelaksanaan pelaporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah;
- e. perumusan Upah Minimum Kabupaten;
- f. peningkatan upaya advokasi, kemitraan ketenagakerjaan;
- g. penilaian dan Pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

4. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja, pembinaan pemagangan dan pembinaan produktivitas tenaga kerja.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja;

- b. pelaksanaan proses pendidikan dan Pelatihan keterampilan berdasarkan klaster Kompetensi;
- c. koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja;
- d. pengadaan sarana pelatihan kerja Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan proses pendidikan dan Pelatihan vokasi bagi pencari kerja berdasarkan unit Kompetensi;
- f. pengadaan sarana pelatihan vokasi dan produktivitas;
- g. pengkoordinasian lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan vokasi dan produktivitas;
- h. pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
- i. penyediaan sumber daya Perizinan lembaga Pelatihan Kerja secara terintegrasi;
- j. pelaksanaan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil;
- k. pelaksanaan kompetensi dan Produktivitas tenaga kerja;
- l. penilaian dan Pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan.
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

5. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian informasi dan perencanaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, serta perluasan kesempatan kerja kerja.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- b. penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja;
- c. pelayanan antar kerja;
- d. penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja;
- e. perluasan kesempatan kerja;
- f. penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secara terintegritas;
- g. pengawasan dan pengendalian LPTKS;
- h. pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online;
- i. pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online;
- j. pelaksanaan job fair/bursa kerja;
- k. pengkoordinasian dan validasi perpanjangan bagi TKA yang bekerja dilokasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
- l. pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas;
- m. penyediaan layanan terpadu pada calon Pekerja Migran Indonesia/PMI;
- n. penilaian dan Pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan.
- o. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

6. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian informasi dan perencanaan tenaga kerja dan transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- b. penyusunan rencana tenaga kerja makro;
- c. pelaksanaan fasilitasi rencana tenaga kerja mikro;
- d. pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data ketenagakerjaan;
- e. pengidentifikasian potensi kawasan transmigrasi;
- f. pelaksanaan advokasi dan musyawarah penetapan kawasan transmigrasi;
- g. penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi;
- h. penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi;
- i. pengkoordinasian dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten;
- j. penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi;
- k. pelaksanaan Penataan Penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi;
- l. pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
- m. penyuluhan transmigrasi;
- n. pelatihan transmigrasi;
- o. pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian;
- p. penilaian dan Pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

7. Kelompok Jabatan

1. Jabatan Fungsional

- a. Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat menetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pada masing masing bidang.
- b. Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- c. Penetapan Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Perangkat Daerah.

Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing-masing.

2. Jabatan Pelaksana

- a. Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ditetapkan dalam jabatan Pelaksana.

- b. Penetapan Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
- c. Nama-nama jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Penetapan Jabatan dan Uraian Tugas Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- e. Penetapan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan setiap awal tahun anggaran dengan mengacu pada Peta Jabatan Perangkat Daerah.

8. UPTD

1. UPTD pada Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di lapangan.
2. UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
3. Jumlah dan jenis UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan UPTD mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kepegawaian

1) Berdasarkan Eselon

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun 2025 berdasarkan Eselon:

-	Eselon II	=	1 Orang
-	Eselon III	=	3 Orang
-	Eselon IV	=	4 Orang
-	Jabatan Fungsional	=	8 Orang

Jumlah = 16 Orang

2) Berdasarkan Pendidikan

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan termasuk Petugas Lapangan Tahun 2025 berdasarkan Pendidikan:

-	Pascasarjana (S2)	=	6 Orang
-	Sarjana	=	16 Orang
-	Sarjana Muda (D3)	=	5 Orang
-	SLTA	=	6 Orang

Jumlah = 33 Orang

3) Berdasarkan Golongan

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan termasuk Petugas Lapangan dan PPPK berdasarkan Golongan:

-	Golongan IV	=	6 Orang
-	Golongan III	=	23 Orang
-	Golongan II	=	1 Orang
-	PPPK	=	3 Orang

Jumlah = 33 Orang

Selain jumlah di atas terdapat pula Tenaga Honorer/Kontrak sebanyak 34 orang dengan tingkat pendidikan sebagai berikut:

-	S1	=	3 Orang
-	D3	=	1 Orang

- SMA	=	19 Orang
- SMP	=	1 Orang
- SD	=	8 Orang
- SD ke bawah	=	2 orang
Jumlah	=	34 Orang

4) Berdasarkan Jenis Kelamin

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan termasuk Petugas Lapangan Tahun 2025 berdasarkan Jenis Kelamin sebagai berikut:

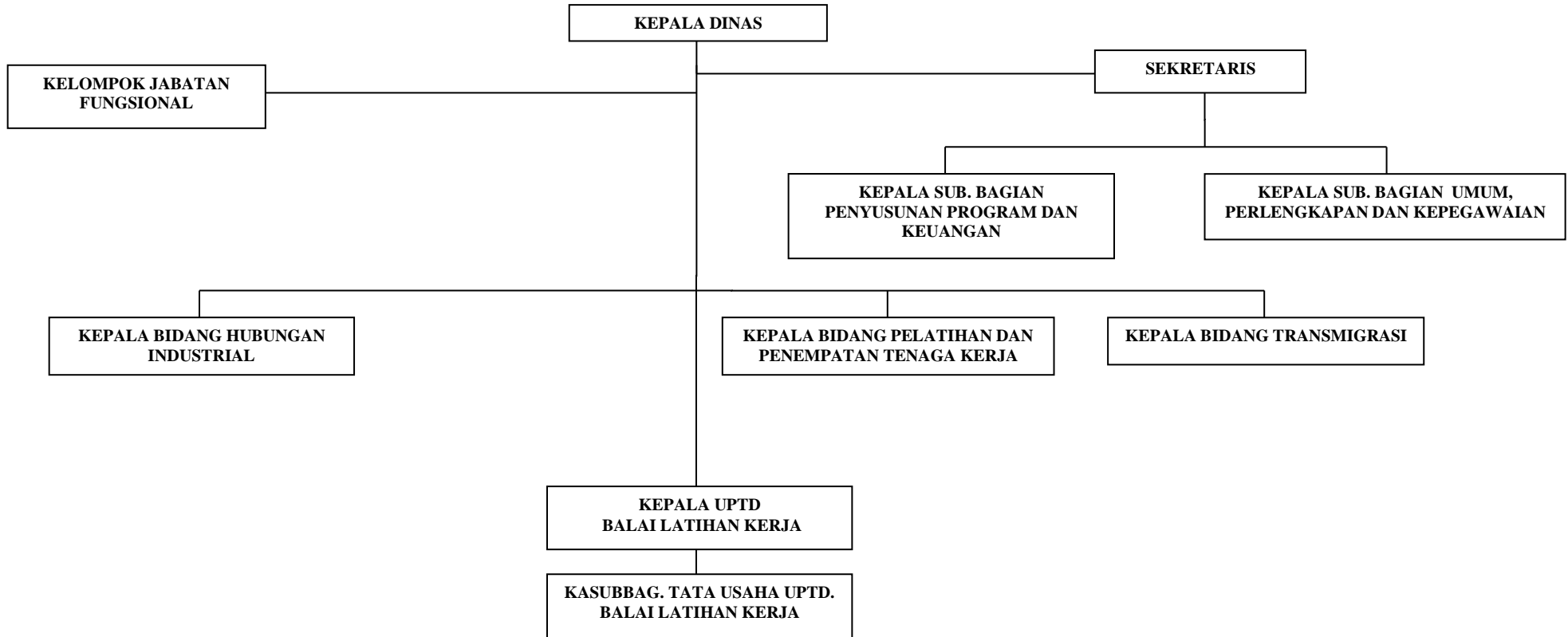
- Laki-laki	=	17 Orang
- Perempuan	=	16 Orang
Jumlah	=	33 Orang

Selain jumlah di atas terdapat pula Tenaga Honorer/Kontrak sebanyak 39 orang berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

- Laki-laki	=	11 Orang
- Perempuan	=	24 Orang
Jumlah	=	35 Orang

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 27 TAHUN 2022
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2022**

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SERUYAN**



C. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan

Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan diarahkan fokus pada kegiatan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Berikut data target, realisasi kinerja serta realisasi keuangan sebagaimana pada tabel dibawah ini.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Seruyan**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke -				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,79%			4,17	3,99	3,79	3,66	3,57	4,3	4,25	3,96	3,61	3,47	4,14	3,92	3,75	3,67	3,60
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	85,74 %			79,04	81,21	85,74	85,74	86,5	65,04	71,46	72,1	67,66	70,04	0,82	0,88	0,84	0,79	0,81
3	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun	13			14	13	13	12		133	133	103	12	11	9,50	10,23	7,92		
			1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.											1					1
			2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.							75,98%	138,8%	83,53%	14,7 %	97,39%	75,98%	138,8%	83,53%	14,7 %	97,39%
			3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster							100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi							100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan							2%	1,43%	2,08%	1,78%	2,5%	2%	1,43%	2,08%	1,78%	2,5%

			4. Persentase LPK yang terakreditasi					6%	11,11%	16,66%	16,66%	16,66%	6%	11,11%	16,66%	16,66%	16,66%
			5. Persentase LPK yang memiliki perizinan					100%	100%	100%	100%	83,33%	100%	100%	100%	100%	83,33%
			6. Jumlah penganggur yang dilatih					137 Org	139 org	96 orang	112 orang	80 orang	137 Org	139 org	96 orang	112 orang	80 orang
			7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan					88,32%	80,57%	87,50%	36,60%	20%	88,32%	80,57%	87,50%	36,60%	20%
			8. Persentase penyerapan lulusan					5,78%	53,95%	42,85%	13,39%	71,25%	5,78%	53,95%	42,85%	13,39%	71,25%
			9. Lulusan bersertifikat kompetensi					79,33%	6,10%	79,76%	173%	400%	79,33%	6,10%	79,76%	173%	400%
			10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas														
			2. Data tingkat produktivitas total														
			1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)					32,78%	31,34%	51,02%	36%	38,18%	32,78%	31,34%	51,02%	36%	38,18%
			2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)					15%	17,07%	24,39%	23,25%	25%	15%	17,07%	24,39%	23,25%	25%

			3. Rekapitulasi tahunan															
			jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat,						2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
			jumlah federasi SP/SB yang tercatat,						2	1	1	1	3	2	1	1	1	3
			jumlah SP/SB di perusahaan yang tercatat,						40	41	41	43	44	40	41	41	43	44
			jumlah SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan						1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
			jumlah anggota SP/SB di perusahaan						15468	17945	17945	17743	17811	15468	17945	17945	17743	17811
			4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.						88,46%	75%	65,71%	60,71%	81,25%	88,46%	75%	65,71%	60,71%	81,25%
			5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan						83,60%	97,29%	86,44%	84,12%	87,30%	83,60%	97,29%	86,44%	84,12%	87,30%
			6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih						27,86%	25,67%	37,28%	19,04%	12,69%	27,86%	25,67%	37,28%	19,04%	12,69%
			7. Jumlah mogok kerja						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8. Jumlah penutupan perusahaan						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9. Jumlah perselisihan kepentingan						18 kasus	1 kasus	1 kasus	0	0	18 kasus	1 kasus	1 kasus	0	0
			10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan						1 kasus	0	0	0	0	1 kasus	0	0	0	0
			11. Jumlah perselisihan PHK						45 kasus	43 kasus	22 kasus	9 kasus	7 kasus	45 kasus	43 kasus	22 kasus	9 kasus	7 kasus

			12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK						133 org	133 org	103 org	125 orang	163 orang	133 org	133 org	103 org	125 orang	163 orang
			13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite						0	0	0	14 kasus	11 kasus	0	0	0	14 kasus	11 kasus
			14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan							ada		ada	tidak ada		ada		ada	tidak ada
			15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial		70%	70%	75%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota						70 low	1445 low	3542 low	674 low	899 low	70 low	1445 low	3542 low	674 low	899 low
			2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota						50 org	554 org	176 org	1131 orang	3018 orang	50 org	554 org	176 org	1131 orang	3018 orang
			3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja						0	0	0	1	2	0	0	0	1	2
			6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.					55	0	29	14	11	55	0	29	14	11
			8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)					13 org	0	0	0	0	13 org	0	0	0	0
			9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata					0	0	0	2	0	0	0	0	2	0
			11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			12. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1. jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya															
			2. jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya															
			jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya															

Berdasarkan pada tabel diatas Tingkat partisipasi angkatan kerja pada Tahun 2020 yaitu 65,04 persen, mengalami kenaikan menjadi 71,46 persen pada tahun 2021, lalu naik sebesar 0,64 persen menjadi 72,1 persen pada tahun 2022, namun mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 67,66 persen dan naik kembali pada tahun 2024 menjadi 70,04 persen. Pada indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) disetiap Tahunnya juga masih belum bisa mencapai target yang telah ditentukan, walaupun turun pada tiap tahunnya dari 4,3 persen di tahun 2020 menjadi 3,47 persen pada tahun 2024, atau turun sebesar 0,05-0,35 persen. Hal ini disebabkan banyak faktor yang salah satunya adalah banyaknya jumlah pencari kerja usia produktif tidak berimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan terdapat juga perusahaan-perusahaan besar swasta yang mengurangi jumlah karyawannya. Serta telah terjadi ketimpangan pasar kerja yang ditandai dengan kelebihan tenaga kerja, disebabkan terutama oleh struktur ekonomi yang belum mampu menyerap seluruh angkatan kerja yang ada, setiap Tahun terus bertambah. Perlu kerja keras dan kerjasama semua pihak baik swasta maupun pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Seruyan.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan masih belum bisa memenuhi target yang ditentukan oleh Perangkat Daerah. Hal itu dikarenakan kendala/hambatan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan secara umum adalah alokasi anggaran yang kecil, masih kurangnya sarana, prasarana dan sumber daya manusia berkualitas yang mendukung kegiatan fisik maupun non fisik serta perubahan (pengurangan) anggaran dari pagu yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga mengakibatkan sebagian kegiatan yang terpaksa dibatalkan.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Seruyan

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendapatan	117.600.000,00	36.240.000,00	36.240.000,00	38.776.800,00	20.000.000,00	16.436.160,00	17.060.160,00	-	-	-							
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	117.600.000,00	36.240.000,00	36.240.000,00	38.776.800,00	20.000.000,00	16.436.160,00	17.060.160,00	-	-	-							
Belanja tidak langsung	2.955.903.148,21	3.805.813.540,00	3.862.853.102,00	4.395.438.876,00	4.620.167.560,00	2.776.804.304,00	3.256.329.391,00	3.660.234.691,00	3.757.525.270,00	4.058.760.339,00	93,9	85,6	94,8	85,5	87,8	1%	3%
- Belanja Pegawai/Personalia	2.955.903.148,21	3.805.813.540,00	3.862.853.102,00	4.395.438.876,00	4.620.167.560,00	2.776.804.304,00	3.256.329.391,00	3.660.234.691,00	3.757.525.270,00	4.058.760.339,00	93,9	85,6	94,8	85,5	87,8		
Belanja langsung	2.824.053.973,00	2.111.079.936,00	2.173.212.436,00	2.546.784.802,00	6.361.228.540,00	2.625.815.702,00	1.929.415.470,00	2.018.569.126,00	4.355.023.139,00	4.242.367.361,60	93,0	91,4	92,9	171,0	66,7		
- Belanja Pegawai/Personalia	772.320.000,00					737.971.384,00					95,6						
- Belanja Barang dan Jasa	1.871.811.973,00	2.054.162.936,00	2.082.484.936,00	2.198.453.802,00	5.649.167.645,00	1.718.812.318,00	1.883.855.470,00	1.930.642.626,00	3.334.180.297,00	3.453.318.011,60	91,8	91,7	92,7	151,7	61,1		
- Belanja Modal	179.922.000,00	56.917.000,00	90.727.500,00	348.331.000,00	712.060.895,00	169.032.000,00	45.560.000,00	87.926.500,00	1.020.842.842,00	789.049.350,00	93,9	80,0	96,9	293,1	110,8		
	5.779.957.121,21	5.916.893.476,00	6.036.065.538,00	6.942.223.678,00	10.981.396.100,00	5.402.620.006,00	5.185.744.861,00	5.678.803.817,00	8.112.548.409,00	8.301.127.700,60							

Berdasarkan pada tabel diatas, target PAD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 selalu mengalami penurunan, dari sebesar Rp. 117.600.000,- pada Tahun 2020, menjadi sebesar Rp. 20.000.000,- di tahun 2024. Hal ini disebabkan berkurangnya jumlah Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kabupaten Seruyan. Untuk realisasi PAD pada Tahun 2020 sebesar Rp. 16.436.160,- dan Tahun 2021 Rp. 17.060.160,-, sedangkan Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 tidak ada realisasi PAD di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dikarenakan adanya perubahan pada Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan mengenai penerimaan Retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA). Untuk Anggaran pada Disnakertrans selama 2020-2024 terus mengalami kenaikan walaupun untuk realisasi keuangannya tidak dapat terserap seratus persen, dikarenakan ada wabah Covid-19 pada Tahun 2020-2022, maka sebagian anggaran di Refocusing atau dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Seruyan.

D. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan

Kelompok sasaran layanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Daerah Kabupaten Seruyan adalah:

a. Ketenagakerjaan:

- ✚ Jumlah perusahaan besar yang terdaftar di wajib lapor Tahun 2025 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:
 - Perusahaan perkebunan sawit sebanyak 25 perusahaan;
 - Perusahaan kayu/HPH sebanyak 1 perusahaan;
 - Perusahaan pengolahan kelapa sawit sebanyak 10 perusahaan;
 - Perusahaan pengolahan minyak mentah dan lemak nabati sebanyak 6 perusahaan.
- ✚ Para pencari kerja

b. Ketransmigrasian:

- ✚ Masyarakat transmigrasi

E. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

- Ketenagakerjaan

Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Seruyan pada Tahun 2020 turun menjadi 4,30 persen, turun berurutan menjadi 4,25 persen pada tahun 2021 terus menurun di angka 3,96 persen pada tahun 2022, hingga di tahun 2023 kembali menurun menjadi 3,61 persen dan kembali turun pada Tahun 2024 menjadi 3,47 persen. Walaupun terus menurun tiap tahunnya, angka kemiskinan daerah khususnya di Kabupaten Seruyan masih tinggi, berbagai faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut adalah:

- Minimnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing;
- Masih terjadi ketimpangan pasar kerja yang ditandai dengan kelebihan tenaga kerja, disebabkan terutama oleh struktur ekonomi yang belum mampu menyerap seluruh angkatan kerja yang ada;
- Masih kurangnya mutu dan produktivitas tenaga kerja;
- Kurangnya semangat dan jiwa kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru;
- Iklm investasi untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja masih perlu ditumbuhkan;
- Belum sinkronnya pembangunan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
- Masih adanya kasus perselisihan Hubungan Industrial antar Pekerja dan Pengusaha, sehingga perlu mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.

- **Ketransmigrasian**

Secara umum masalah yang ada di Kabupaten Seruyan adalah minimnya upaya perwujudan ketahanan ekonomi kerakyatan dalam menghadapi resesi ekonomi global, hal ini juga berdampak pada masyarakat transmigrasi. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan pada ketransmigrasian adalah:

- a) Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi sektor unggulan daerah;
- b) Kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam pengembangan transmigrasi belum optimal;
- c) Masih perlunya pembinaan masyarakat di wilayah transmigrasi khususnya pembinaan usaha dan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah transmigrasi yang juga memberi pengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat secara luas;
- d) Belum tersedianya tenaga penyuluh untuk peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di kawasan transmigrasi;
- e) Belum tersedianya lahan untuk membuka Transmigrasi baru.

F. Isu Strategis

Berdasarkan telaahan diatas, dapat di tentukan isu-isu strategis dibidang ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian sebagai berikut:

- **Ketenagakerjaan**

- a. Perlu adanya peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja;
- b. Perlunya pengembangan semangat dan jiwa kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru;
- c. Perlu adanya perbaikan iklim investasi untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja;

d. Perlunya adanya sinkronisasi pembangunan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja

- **Ketransmigrasian**

a. Perlunya optimalisasi kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam pengembangan transmigrasi;

b. Perlu adanya ketersediaan tenaga penyuluh untuk peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di kawasan transmigrasi;

Tabel 2.1

TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DISNAKERTRANS	PERMASALAHAN DISNAKERTRANS	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DISNAKERTRANS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DISNAKERTRANS			ISU STRATEGIS DISNAKERTRANS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Sektor Perkebunan	Minimnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Ekonomi dan Ketenagakerjaan	<i>Involuntary Migration</i>	<i>Aging Population</i> Negara Maju	Pembangunan Ekonomi	Pengentasan Kemiskinan
	Masih terjadi ketimpangan pasar kerja yang ditandai dengan kelebihan tenaga kerja, disebabkan terutama oleh struktur ekonomi yang belum mampu menyerap seluruh angkatan kerja yang ada	Kesenjangan Sosial dan Kemiskinan	Polarisasi Sosial		Kesejahteraan Masyarakat	Menurunkan Pengangguran
	Masih kurangnya mutu dan produktivitas tenaga kerja				Pembangunan Sumber Daya Manusia	
	Kurangnya semangat dan jiwa kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru					
	Iklm investasi untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja masih perlu ditumbuhkan					
	Belum sinkronnya pembangunan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja					
	Masih adanya kasus perselisihan Hubungan Industrial antar Pekerja dan Pengusaha, sehingga perlu mewujudkan hubungan industrial yang harmonis					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DISNAKERTRANS	PERMASALAHAN DISNAKERTRANS	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DISNAKERTRANS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DISNAKERTRANS			ISU STRATEGIS DISNAKERTRANS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
	Kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam pengembangan transmigrasi belum optimal					
	Masih perlunya pembinaan masyarakat di wilayah transmigrasi khususnya pembinaan usaha dan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah transmigrasi yang juga memberi pengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat secara luas					
	Belum tersedianya tenaga penyuluh untuk peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di kawasan transmigrasi					
	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi sektor unggulan daerah					

a. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kalimantan Tengah.

➤ **Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Provinsi Kalimantan Tengah**

Sesuai dengan dokumen RPJMD, VISI Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2029 adalah:

***“KALIMANTAN TENGAH YANG TANGGUH,
BERMARTABAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”***

Dengan MISI sebagai berikut

- a. Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Membangun SDM yang Sehat, Unggul, Berdaya Saing dan Adaptif
- b. Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
- c. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan
- d. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi
- e. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Melalui Pertumbuhan Ekonomi Berwawasan Lingkungan dan Berdaya Saing Global
- f. Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan
- g. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah

➤ **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Seruyan sebagai salah satu pusat ekonomi wilayah Provinsi yang maju dan sejahtera berbasis pertanian, perikanan, pariwisata serta pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Strategi yang dilakukan dalam pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman untuk mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, perikanan dan pariwisata sesuai potensi wilayah meliputi peningkatan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk

mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perdesaan terutama di kawasan pusat pertumbuhan di Kota Kuala Pembuang sebagai PKL.

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah, pengembangan transmigrasi di Kalimantan Tengah Kawasan peruntukan kawasan permukiman perdesaan termasuk wilayah perdesaan di seluruh Kecamatan Kabupaten Seruyan serta kawasan pengembangan transmigrasi seluas 8.647,57 hektar.

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi dalam rangka transformasi struktur perekonomian daerah harus memperhatikan rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Seruyan. Hal ini ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah serta menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program.

Ada beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong untuk pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasar kajian lingkungan hidup dan tata ruang wilayah:

a. Faktor-faktor Yang Menghambat

1. Belum tersedianya Infrastruktur memadai sebagai akses ke daerah-daerah di pelosok yang tersebar di Kabupaten Seruyan;
2. Tingkat pengangguran terbuka yang terus meningkat;
3. Rendahnya kualitas SDM.

b. Faktor-faktor yang mendorong

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan dan Kabupaten;
2. Kebijakan Pemerintah daerah yang membuka terisolasi daerah;
3. Kebijakan kelestarian lingkungan dalam mempertahankan kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut diatas perlu dilakukan kajian analisa lingkungan strategis dan lingkungan internal, yaitu:

a. Analisis Lingkungan Strategis

Untuk menentukan strategi pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian lima Tahun ke depan dalam renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan, maka dilakukan evaluasi diri (*self-evaluation*) terhadap kondisi yang ada pada saat ini. Berdasarkan hasil evaluasi diri tersebut dilakukan penilaian terhadap kondisi lingkungan internal yang mencakup kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*); serta kondisi lingkungan eksternal yang mencakup peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threatening*).

b. Lingkungan Internal

Kekuatan (Strength)

A. Organisasi

1. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan seperti tertuang dalam Peraturan Bupati Seruyan (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan.

B. Sistem pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian:

1. Adanya dukungan dana APBD dan APBN
2. Adanya kerjasama antar daerah untuk pelaksanaan program transmigrasi
3. Komitmen bersama untuk menurunkan angka pengangguran

Kelemahan (Weakness)

A. Organisasi

1. Sumberdaya manusia di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan belum cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas;

2. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pembangunan ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian khususnya dalam pelaksanaan penyuluhan lapangan dan instruktur untuk pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat dibidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian.
 3. Belum optimalnya Balai Latihan Kerja untuk pelaksanaan pelatihan bagi pencari kerja yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- B. Sistem pembangunan ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian:
1. Masih kurangnya mutu dan produktivitas tenaga kerja;
 2. Kurangnya semangat dan jiwa kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru;
 3. Iklim investasi untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja masih perlu ditumbuhkan;
 4. Belum sinkronnya pembangunan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 5. Kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam pengembangan transmigrasi belum optimal;
 6. Belum tersedianya tenaga penyuluh untuk peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di kawasan transmigrasi;

Ancaman (Threatening)

1. Dinamisnya perubahan kepegawaian di daerah (pergantian aparat/pindah).
2. Cepatnya arus informasi dan teknologi yang tidak diimbangi dengan kemampuan SDM yang memadai.
3. Ketatnya persaingan pasar kerja.

Alternatif Strategi

Memperhatikan lingkungan internal dan eksternal di atas, maka beberapa strategi yang dapat dikembangkan:

Strategi SO (Strength-Opportunity):

- ✚ Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan pemerintah Kabupaten Seruyan dalam hal penerapan prinsip partisipasi yaitu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan khususnya pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kabupaten Seruyan.
- ✚ Memanfaatkan teknologi budidaya informasi dan komunikasi untuk promosi potensi daerah baik potensi ketenagakerjaan maupun ketransmigrasian.

Strategi ST (Strength-Threat) :

- ✚ Meningkatkan kualitas SDM dalam pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- ✚ Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja untuk bersaing di pasar kerja;
- ✚ Mensinkronkan pembangunan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Strategi WO (Weakness-Opportunity)

- ✚ Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor serta stakeholders dalam pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- ✚ Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan permasalahan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Strategi WT (Weakness-Threatening)

- ✚ Mendorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD dan dana masyarakat.
- ✚ Memecahkan permasalahan strategis melalui kebijakan lintas sektor.

a. SASARAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

- 1 Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP);
- 2 Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) ;
- 3 Berdasarkan arahan Presiden kepada Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, menempatkan transmigran sebanyak 3 juta KK atau minimal 1 Juta KK. Namun saat ini kemampuan anggaran hanya bisa mentransmigrasikan 5.000 KK;
- 4 Pengembangan Permukiman Transmigrasi dengan menempatkan 3.000.000 KK Transmigran di 6.392 Permukiman.

b. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

1. Minimnya dukungan program, kegiatan dan anggaran lintas sektor terkait dan pemerintah daerah;
2. Perlunya dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan kawasan transmigrasi;
3. Masih banyaknya kawasan transmigrasi (279 kawasan transmigrasi dari 619 kawasan transmigrasi) yang belum berkembang sebagai embrio kota kecil karena keterbatasan infrastruktur;
4. Adanya beban penyelesaian sertifikat Hak Milik Transmigran sejumlah 335.276 di 27 Provinsi 193 Kabupaten 1.035 Lokasi.

Disektor Ketransmigrasian pada umumnya permasalahannya ditingkat kabupaten/kota antara lain minimnya jumlah aparatur ketransmigrasian baik kuantitas maupun kualitas, terbatasnya infrastruktur pendukung yang membuka akses antara lokasi transmigrasi dengan pusat-pusat pemasaran, koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan lintas pelaku belum optimal, serta penyelesaian sertifikat Hak Milik Transmigran.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam pemerintahan daerah, visi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan serta menetapkan prioritas pembangunan selama masa jabatannya. Oleh karena itu, visi harus dirancang dengan cermat agar dapat menjadi arah yang jelas bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Visi pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dirumuskan setelah mengkaji kondisi umum daerah, menganalisis potensi dan permasalahan yang ada, menilai isu-isu strategis, dan memperhatikan aspirasi dari pemangku kepentingan (stakeholder) yang kemudian dirumuskan sebagai berikut,

“TERWUJUDNYA TRANSFORMASI PEMBANGUNAN KABUPATEN SERUYAN YANG BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, ADIL, MAJU DAN AMANAH UNTUK SEMUA”

Misi merupakan penjabaran dari visi yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengimplementasikan langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya. Misi dirancang sebagai landasan dalam menetapkan tujuan, sasaran, serta kebijakan. Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Seruyan untuk periode Tahun 2025-2029, antara lain:

- MISI I : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul.
- MISI II : Mewujudkan Iklim kehidupan yang Berbudaya, Demokratis, Agamis, Bermoral, Tertib, dan Inklusif
- MISI III : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa, dan Inovasi Layanan Publik
- MISI IV : Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana

- MISI V : Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Investasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Daerah

Misi yang sesuai dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah:

MISI I : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul.

MISI III : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa, dan Inovasi Layanan Publik

Untuk memastikan kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka waktu lima tahun, RPJMD Kabupaten Seruyan dirancang berdasarkan tema pembangunan tahunan. Tema ini menjadi landasan dalam merumuskan arah kebijakan yang lebih jelas sehingga memudahkan implementasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setiap tema memiliki keterkaitan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Tema pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 adalah **Transformasi Pembangunan Menuju Kabupaten Seruyan yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing**, yang kemudian dijabarkan dalam lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Tahun 1 (Fondasi Transformasi Pembangunan – Konsolidasi Kebijakan dan Infrastruktur Dasar)
2. Tahun 2 (Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan SDM – Penguatan Daya Saing Manusia dan Sarana Prasarana)
3. Tahun 3 (Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah – Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Lokal dan Investasi)
4. Tahun 4 (Kemandirian dan Keberlanjutan Pembangunan – Mewujudkan Kabupaten Seruyan yang Mandiri dan Berdaya Saing)
5. Tahun 5 (Keberlanjutan Ekonomi dan Tata Kelola - Menuju Kabupaten Seruyan yang Berkelanjutan dan Amanah)

3.1. Tujuan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari proses pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satu upayanya adalah peningkatan daya saing masyarakat, daya saing masyarakat akan berdampak pada produktivitas masyarakat. Produktifitas masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat Pendidikan, kondisi kesehatan, pendapatan dan kualitas aktivitas sosial masyarakat. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dari Tahun 2025 sampai Tahun 2029.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, maka dibutuhkan sumber penghidupan yang baik. Angkatan kerja yang memiliki pekerjaan, merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Masalah ketenagakerjaan dan pengangguran merupakan hal yang sangat penting dan membutuhkan penanganan yang terpadu. Upaya meningkatkan kesempatan kerja yang menunjang produktivitas angkatan kerja diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Berdasarkan tujuan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Seruyan diantaranya yaitu: Meningkatkan kesempatan kerja yang menunjang produktivitas angkatan kerja, maka tujuan pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan dalam lima Tahun kedepan adalah:

1. Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja; Terwujudnya Pengembangan wilayah baru.

3.2. Sasaran

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi maka diharapkan pada Tahun 2025-2029 tercapai sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah;
- b. Meningkatnya Kesempatan Kerja;
- c. Meningkatnya Keselamatan dan Kesejahteraan Pekerja;
- d. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi/eks transmigrasi yang dibina.

3.3 Strategi

Strategi merupakan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi dijabarkan ke dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bertujuan mencapai visi pembangunan. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, strategi mencakup langkah-langkah yang berisi program-program indikatif guna merealisasikan visi dan misi.

Sehubungan dengan hal tersebut, strategi pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Misi 1: MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN MEMBANGUN SDM UNGGUL, dengan strategi:

- Perluasan akses terhadap peluang kerja yang inklusif
- Optimalisasi program perlindungan sosial bagi kelompok rentan
- Peningkatan Kolaborasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat

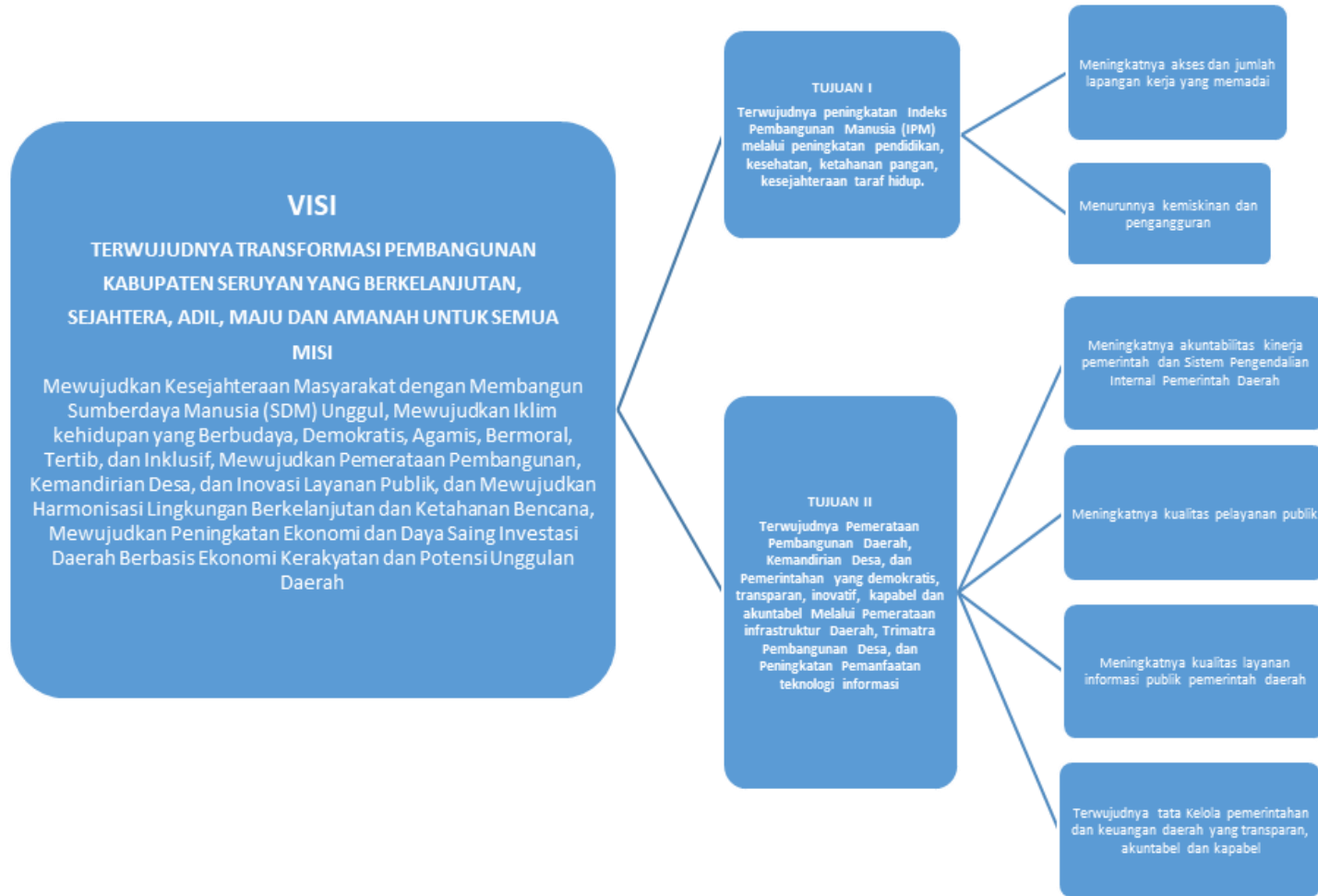
Misi 3: MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN, KEMANDIRIAN DESA, DAN INOVASI LAYANAN PUBLIK, dengan strategi:

- Percepatan reformasi birokrasi dan sistem pengelolaan keuangan daerah
- Penguatan sistem akuntabilitas dan pengawasan kinerja internal pemerintahan
- Peningkatan transparansi informasi daerah dan penguatan keamanan data publik
- Peningkatan standar dan digitasilasi pelayanan publik

Gambar 3.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

RPJMD





RENSTRA



3.4. Arah Kebijakan

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah diwujudkan melalui strategi yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan sebagai prioritas pembangunan. Arah kebijakan berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun, mengalokasikan sumber daya, serta menjalankan program secara efektif, efisien, dan terukur guna mencapai prioritas tujuan dan sasaran misi pembangunan. Arah kebijakan yang diambil oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu, Meningkatkan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja; Meningkatkan Upah Minimum Kabupaten 2 kali diatas Angka Garis Kemiskinan Kabupaten; Memperluas ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal; Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial inklusif dan adaptif bagi masyarakat rentan dan miskin; Mengoptimalisasi pelayanan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan; Memperkuat pemberdayaan sosial bagi kelompok miskin dan rentan; Meningkatkan Kualitas Tenaga kerja; Meningkatkan Kualitas Pelayanan Antar Kerja; Berkurangnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); Terjaminnya perlindungan dan Kesejahteraan pekerja; Mendorong Munculkan Wirausaha di Sektor Ekonomi Lokal; Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi. Arah kebijakan yang dirancang mencerminkan strategi pembangunan yang berkelanjutan serta berdaya saing dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Seruyan.

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASELINE 2024 (05)	TARGET TAHUN						KET. (12)
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)	
2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
- Menurunnya kemiskinan - Menurunnya pengangguran	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja, Terwujudnya Pengembangan wilayah baru		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	0	65	70	75	80	85	85	
			Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi (Angka)	0	4.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	60	60	70	70	80	80	80	
		Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70,04	68,05	68,25	68,44	68,64	68,84	69,04	
		Meningkatnya Keselamatan dan Kesejahteraan Pekerja	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi/ eks transmigrasi yang dibina		Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	80	80	82	84	85	88	90	

Penahapan Renstra Disnakertrans berdasarkan pada tahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Seruyan yang tertuang pada RPJMD kabupaten seruyan, dimana tahapan untuk Disnakertrans dijabarkan sebagai berikut:

1. Pada tahun pertama tahapan pertama **Fondasi Transformasi Pembangunan diprioritaskan pada Perencanaan Dan Penataan Sistem Pemerintah Yang Akuntabel**, prioritas ini memfokuskan pada penyusunan rencana strategis yang partisipatif dan berbasis data, penataan kelembagaan dan alat kerja yang efektif dan efisien, pembangunan sistem pengendalian dan evaluasi pemerintah daerah, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah
2. Tahapan kedua ditahun kedua adalah **Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan SDA** yang prioritasnya ada dua, yaitu yang pertama Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Tenaga Kerja, prioritas ini memiliki fokus pada peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelatihan dan Pendidikan kerja, peningkatan kompetensi sertifikasi yang bertandar nasional maupun internasional, serta penguatan regulasi dan kebijakan tentang ketenagakerjaan.
Prioritas kedua pada tahapan ini yaitu: **Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat Rentan**, prioritas ini berfokus pada perlindungan secara kuratif, preventif, dan pemberdayaan Masyarakat rentan.
3. Pada tahun ketiga dan tahapan ketiga yaitu **Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah**, prioritas Disnakertrans bertambah dengan **Peningkatan Kewirausahaan Masyarakat** yang berfokus pada peningkatan kapasitas kewirausahaan melalui pelatihan dan pendampingan teknis, dan **Penataan Desa Mandiri dan Ketahanan Pangan Lokal**, berfokus pada peningkatan kapasitas pemerintahan desa.

Untuk tahun dan tahapan berikutnya prioritas Pembangunan Disnakertrans sesuai dengan tupoksinya.

Tabel 3.4

PENAHAPAN RENSTRA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelatihan dan Pendidikan kerja	Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelatihan dan Pendidikan kerja	Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelatihan dan Pendidikan kerja	Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelatihan dan Pendidikan kerja	Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelatihan dan Pendidikan kerja
Peningkatan kompetensi sertifikasi yang bertandar nasional maupun internasional,	Peningkatan kompetensi sertifikasi yang bertandar nasional maupun internasional,	Peningkatan kompetensi sertifikasi yang bertandar nasional maupun internasional,	Peningkatan kompetensi sertifikasi yang bertandar nasional maupun internasional,	Peningkatan kompetensi sertifikasi yang bertandar nasional maupun internasional,
Penguatan regulasi dan kebijakan tentang ketenagakerjaan.	Penguatan regulasi dan kebijakan tentang ketenagakerjaan.	Penguatan regulasi dan kebijakan tentang ketenagakerjaan.	Penguatan regulasi dan kebijakan tentang ketenagakerjaan.	Penguatan regulasi dan kebijakan tentang ketenagakerjaan.
Perlindungan secara kuratif, preventif, dan pemberdayaan Masyarakat rentan	Perlindungan secara kuratif, preventif, dan pemberdayaan Masyarakat rentan	Perlindungan secara kuratif, preventif, dan pemberdayaan Masyarakat rentan	Perlindungan secara kuratif, preventif, dan pemberdayaan Masyarakat rentan	Perlindungan secara kuratif, preventif, dan pemberdayaan Masyarakat rentan
		Peningkatan kapasitas kewirausahaan melalui pelatihan dan pendampingan teknis		
		Peningkatan kapasitas pemerintahan desa		

Tabel 3.5**TEKNIK MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

No.	OPERASIONALISASI NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Disnakertrans	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya pelatihan untuk tenaga kerja	Meningkatkan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja	Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar kerja.	
2	Peningkatan Layanan Informasi Pasar Kerja (IPK)	Meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah	Peningkatan kualitas pelayanan penempatan	
3	Pelayanan Pembuatan Kartu A.K. 1	Memperluas ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal	Pengembangan lapangan usaha/kerja yang menampung angkatan kerja lokal	
4	Pelaksanaan informasi sarana Hubungan Industrial dan kesejahteraan tenaga kerja	Meningkatkan Upah Minimum Kabupaten 2 kali diatas Angka Garis Kemiskinan Kabupaten	Penetapan upah minimum kabupaten dan upah minimum sektoral kabupaten	
5	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial inklusif dan adaptif bagi masyarakat rentan dan miskin	Penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	

6	Perencanaan dan pelaporan Kinerja	Meningkatkan kualitas kebijakan dan kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan Nilai SAKIP	
		Meningkatkan sistem pelaporan yang transparan		
		Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan pemerintah daerah		
		Meningkatkan keterbukaan dan akses informasi pemerintah daerah		
		Meningkatkan penggunaan teknologi dalam menyebarkan informasi ke publik		
		Menguatkan pelayanan publik berbasis online		

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal Tahun perencanaan, target, pagu indikatif dan lokasi selama 5 (lima) Tahun mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan Tahunan.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan kedalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan sesuai nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

- Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah

e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

f. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

2. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
- Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

3. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
- Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
- Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
- Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

- Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
 - b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**
 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - c. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**
 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi
 - d. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**
 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
 - e. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 4. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**
- a. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**
 - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
 - Pelayanan antar Kerja
 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
 - Perluasan Kesempatan Kerja
 - b. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi
 - Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
 - c. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**
 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - Job Fair/Bursa Kerja

d. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
- Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
- Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

5. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
- Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
- Pelaksa Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota naan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
- **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**
 - 1. PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**
 - a. Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**
 - Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
 - Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan
 - Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 - Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
 - 2. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**
 - a. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran
 - Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi
 - Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyuluhan Transmigrasi
 - Pelatihan Transmigrasi
 - Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi
 - Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat
 - Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran
 - Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal

- Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal
- Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran
- Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik)
- Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota
- Penampungan Kabupaten/Kota
- Cek Kesehatan Calon Transmigrasi
- Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa)
- Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi
- Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)
- Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

a. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian

- Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman
- Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					6.796.069.447		6.886.982.487		7.175.576.094		7.525.791.927		7.895.929.046	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.401.458.447		6.471.935.996		6.659.610.622		6.940.243.334		7.224.776.805	
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	6.401.458.447	100	6.471.935.996	100	6.659.610.622	100	6.940.243.334	100	7.224.776.805	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					5.000.000		5.500.000		6.050.000		6.655.000		6.655.000	
Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	100	0	100	5.000.000	100	5.500.000	100	6.050.000	100	6.655.000	100	6.655.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					264.000.000		277.783.191		323.800.000		374.166.573		443.979.000	
Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkatkan produktivitasnya (%)	100	70	73	264.000.000	75	277.783.191	78	323.800.000	80	374.166.573	83	443.979.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	1,1	5	6		7		8		9		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					22.315.000		23.646.500		26.011.150		28.612.265		29.701.265	
Meningkatnya penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	12,55	50	52	22.315.000	55	23.646.500	57	26.011.150	60	28.612.265	60	29.701.265	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					103.296.000		108.116.800		160.104.322		176.114.755		190.816.976	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	41.030	39.232	39.232	103.296.000	39.232	108.116.800	39.232	160.104.322	39.232	176.114.755	39.232	190.816.976	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					78.665.000		64.640.900		118.489.990		127.838.989		138.205.814	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					25.750.000		25.000.000		30.500.000		31.050.000		37.237.485	
Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	0	0	46	25.750.000	47	25.000.000	48	30.500.000	49	31.050.000	50	37.237.485	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					39.815.000		26.330.900		73.348.990		80.683.889		83.532.229	
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	0	45	46	39.815.000	47	26.330.900	48	73.348.990	49	80.683.889	50	83.532.229	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					13.100.000		13.310.000		14.641.000		16.105.100		17.436.100	
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	0	0	46	13.100.000	47	13.310.000	48	14.641.000	49	16.105.100	50	17.436.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
TOTAL					6874734447.00		6951623387.00		7294066084.00		7653630916.00		8034134860.00	

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.	
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	
2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
- Menurunnya kemiskinan - Menurunnya pengangguran	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja, Terwujudnya Pengembangan wilayah baru				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)			
					Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi (Angka)			
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)		
		Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah			Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
					Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.07.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.07.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.07.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.07.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Persentase Barang Milik Daerah yang di administrasikan pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2.07.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.07.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2.07.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.07.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Persentase Pendapatan Daerah yang diadministrasikan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	2.07.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				pada Perangkat Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	2.07.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	
				Persentase Pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.07.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.07.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.07.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.07.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.07.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.07.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.07.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Persentase pengadaan BMD terhadap pengadaan RKBMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		2.07.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		2.07.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		2.07.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
			Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.07.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.07.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.07.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.07.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	2.07.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	
		Meningkatnya Kesempatan Kerja			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)		
				Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
					Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
					Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
					Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
			Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja		Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
					Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
				Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n (Kesepakatan)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
					Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
					Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Lembaga)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
					Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi	
					Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	2.07.03.2.01.0002 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
					Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
					Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	2.07.03.2.01.0004 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	
					Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Lembaga)	2.07.03.2.01.0005 - Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	
					Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n (Kesepakatan)	2.07.03.2.01.0006 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Jumlah lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang mendapatkan pembinaan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
				Jumlah Perizinan dan Lembaga pelatihan Kerja yang terdaftar	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	2.07.03.2.03 - Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	
					Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	2.07.03.2.03.0001 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	
				Jumlah laporan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	2.07.03.2.04 - Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	
					Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	2.07.03.2.04.0001 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	
				Jumlah Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	2.07.03.2.05 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	2.07.03.2.05.0001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	
			Meningkatnya penempatan Tenaga Kerja		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Jumlah pencari kerja yang mendapatkan kesempatan kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)	2.07.04.2.01.0001 - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
					Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja	
				Jumlah izin lembaga penempatan tenaga kerja	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku (Lembaga)	2.07.04.2.02 - Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi (Lembaga)	2.07.04.2.02 - Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi (Lembaga)	2.07.04.2.02.0001 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	
					Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku (Lembaga)	2.07.04.2.02.0002 - Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	
				Jumlah laporan pengelolaan informasi pasar kerja	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
					Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
					Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	2.07.04.2.03.0001 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	
					Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja	
				Persentase PMI (Pradan Purna Penempatan) di	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				daerah kabupaten/kota yang dilindungi	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
					Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	2.07.04.2.04.0002 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	
					Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	2.07.04.2.04.0003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	
		Meningkatnya Keselamatan dan Kesejahteraan Pekerja			Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan ((%))		
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Jumlah perusahaan yang mengesahkan PP/PKB	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
					Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	2.07.05.2.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	
					Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
				jumlah perusahaan yang di tangani dalam pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	2.07.05.2.02.0003 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	
					Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi/ eks transmigrasi yang dibina			Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)		
			Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi		Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
				Jumlah kawasan transmigrasi yang dicadangkan	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dokumen)	3.32.02.2.01 - Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	
					Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi (Dokumen)	3.32.02.2.01 - Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	
					Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi (Kawasan Transmigrasi)	3.32.02.2.01 - Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	
					Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Hektar)	3.32.02.2.01 - Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dokumen)	3.32.02.2.01.0001 - Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	
					Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi (Kawasan Transmigrasi)	3.32.02.2.01.0002 - Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	
					Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Hektar)	3.32.02.2.01.0003 - Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
					Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi (Dokumen)	3.32.02.2.01.0004 - Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	
			Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi		Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
				Jumlah laporan pelaksanaan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran (Paket)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan (Lokasi)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Orang)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan (Orang)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (KK)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Keterampilan Spesifik) (KK)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan (Kepala Keluarga)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya (KK)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya (KK)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi (Kepala Keluarga)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) (Dokumen)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan (KK)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi (KK)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Kabupaten Daerah Asal (KK)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran (KK)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Sebelum Keberangkatan (di Tingkat Desa) (Orang)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS) (Kepala Keluarga)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	3.32.03.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) (Dokumen)	3.32.03.2.01.0002 - Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	
					Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS) (Kepala Keluarga)	3.32.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	
					Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga)	3.32.03.2.01.0004 - Pemandahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan (Kepala Keluarga)	3.32.03.2.01.0005 - Penyuluhan Transmigrasi	
					Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Orang)	3.32.03.2.01.0006 - Pelatihan Transmigrasi	
					Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	3.32.03.2.01.0007 - Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	
					Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya (KK)	3.32.03.2.01.0008 - Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	
					Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan (Lokasi)	3.32.03.2.01.0009 - Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan (Orang)	3.32.03.2.01.0010 - Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	
					Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya (KK)	3.32.03.2.01.0011 - Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal	
					Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (KK)	3.32.03.2.01.0012 - Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran	
					Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Keterampilan Spesifik) (KK)	3.32.03.2.01.0013 - Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik)	
					Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan (KK)	3.32.03.2.01.0014 - Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota	
					Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Kabupaten Daerah Asal (KK)	3.32.03.2.01.0015 - Penampungan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran (KK)	3.32.03.2.01.0016 - Cek Kesehatan Calon Transmigran	
					Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Sebelum Keberangkatan (di Tingkat Desa) (Orang)	3.32.03.2.01.0017 - Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa)	
					Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi (KK)	3.32.03.2.01.0018 - Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	
					Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran (Paket)	3.32.03.2.01.0019 - Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)	
					Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)	3.32.03.2.01.0020 - Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
			Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi		Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
				Jumlah satuan permukiman yang dikembangkan	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	3.32.04.2.01 - Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	
					Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	3.32.04.2.01 - Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	
					Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	3.32.04.2.01.0001 - Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	
					Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	3.32.04.2.01.0002 - Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				6.796.069.447		6.886.982.487		7.175.576.094		7.525.791.927		7.895.929.046		
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.401.458.447		6.471.935.996		6.659.610.622		6.940.243.334		7.224.776.805		
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	6.401.458.447	100	6.471.935.996	100	6.659.610.622	100	6.940.243.334	100	7.224.776.805	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				42.815.000		46.500.000		52.500.000		60.250.000		77.750.000		
Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	20	42.815.000	20	46.500.000	20	52.500.000	20	60.250.000	20	77.750.000		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10	12		14		14		14		14			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	10		10		10		10		10			
2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.000		22.000.000		25.000.000		30.000.000		40.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	20	20.000.000	20	22.000.000	20	25.000.000	20	30.000.000	20	40.000.000		
2.07.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.815.000		1.500.000		1.500.000		1.650.000		1.650.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	2	1.815.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.650.000	2	1.650.000		
2.07.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20.000.000		22.000.000		25.000.000		27.500.000		35.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10	12	20.000.000	14	22.000.000	14	25.000.000	14	27.500.000	14	35.000.000		
2.07.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.100.000		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.100.000	10	1.100.000		
2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.776.502.127		4.779.563.734		4.896.038.622		5.090.774.134		5.231.424.314		
Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan pada Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	31	34	4.776.502.127	36	4.779.563.734	38	4.896.038.622	40	5.090.774.134	40	5.231.424.314		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	16		16		16		16		16			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.773.687.127		4.777.063.734		4.893.538.622		5.088.024.134		5.228.674.314		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	31	34	4.773.687.127	36	4.777.063.734	38	4.893.538.622	40	5.088.024.134	40	5.228.674.314		
2.07.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.815.000		1.500.000		1.500.000		1.650.000		1.650.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	1.815.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.650.000	2	1.650.000		
2.07.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.100.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	16	1.000.000	16	1.000.000	16	1.000.000	16	1.100.000	16	1.100.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.07.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.629.000		3.500.000		3.500.000		3.850.000		3.850.000		
Terlaksananya pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	2	3.629.000	2	3.500.000	2	3.500.000	2	3.850.000	2	3.850.000		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	2		2		2		2		2			
2.07.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.629.000		1.500.000		1.500.000		1.650.000		1.650.000		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	2	1.629.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.650.000	2	1.650.000		
2.07.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.100.000		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.100.000	2	1.100.000		
2.07.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.100.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.100.000	2	1.100.000		
2.07.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.210.000		
Terlaksananya pengadministrasian Pendapatan Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	0	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.100.000	5	1.210.000	5	1.210.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.07.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.210.000		
Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	0	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.100.000	5	1.210.000	5	1.210.000		
2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				76.630.000		84.000.000		91.000.000		100.800.000		126.300.000		
Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian pada Pegawai di perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	2	76.630.000	2	84.000.000	2	91.000.000	2	100.800.000	2	126.300.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	30		30		30		30		30			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	25		30		30		30		30			
2.07.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				40.000.000		45.000.000		45.000.000		50.000.000		60.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4	4	40.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	50.000.000	4	60.000.000		
2.07.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.815.000		1.500.000		1.500.000		1.650.000		1.650.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	2	1.815.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.650.000	2	1.650.000		
2.07.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1.815.000		1.500.000		1.500.000		1.650.000		1.650.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	2	1.815.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.650.000	2	1.650.000		
2.07.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				10.000.000		11.000.000		15.000.000		17.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6	3	10.000.000	3	11.000.000	3	15.000.000	3	17.000.000	3	20.000.000		
2.07.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000		
2.07.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20.000.000		22.000.000		25.000.000		27.500.000		40.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	25	20.000.000	30	22.000.000	30	25.000.000	30	27.500.000	30	40.000.000		
2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				624.260.000		637.500.000		655.250.000		687.475.000		732.374.291		
Tersedianya administrasi umum pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7	7	624.260.000	7	637.500.000	7	655.250.000	7	687.475.000	7	732.374.291		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	10		10		10		10		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	187	80		80		80		80		80			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	5		5		5		5		5			
2.07.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					7.260.000		7.500.000		8.250.000		9.075.000		9.075.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2		7.260.000		7.500.000		8.250.000		9.075.000		9.075.000	
2.07.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					128.000.000		130.000.000		138.000.000		140.000.000		150.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10		128.000.000		130.000.000		138.000.000		140.000.000		150.000.000	
2.07.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					20.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	10		20.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
2.07.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					125.000.000		130.000.000		135.000.000		140.000.000		150.518.291	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8	125.000.000	8	130.000.000	8	135.000.000	8	140.000.000	8	150.518.291		
2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.000.000		30.000.000		33.000.000		36.300.000		40.560.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	35.000.000	1	30.000.000	1	33.000.000	1	36.300.000	1	40.560.000		
2.07.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				8.000.000		9.000.000		9.900.000		10.890.000		10.890.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7	7	8.000.000	7	9.000.000	7	9.900.000	7	10.890.000	7	10.890.000		
2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000		320.000.000		320.000.000		340.000.000		360.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	187	80	300.000.000	80	320.000.000	80	320.000.000	80	340.000.000	80	360.000.000		
2.07.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.100.000	5	1.210.000	5	1.331.000		
2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				64.200.000		66.620.000		76.282.000		86.210.200		91.210.200		
Terlaksananya pengadaan BMD terhadap pengadaan RKBMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	30	35	64.200.000	40	66.620.000	45	76.282.000	50	86.210.200	50	91.210.200		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	10		10		10		10		10			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	5		6		7		8		8			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
2.07.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					20.000.000		20.000.000		22.000.000		25.000.000		28.000.000	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	5		20.000.000		20.000.000		22.000.000		25.000.000		28.000.000	
2.07.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					10.000.000		10.000.000		15.000.000		18.000.000		20.000.000	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	2		10.000.000		10.000.000		15.000.000		18.000.000		20.000.000	
2.07.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.500.000		5.500.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	30	35		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.500.000		5.500.000	
2.07.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.500.000		5.500.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	10		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.500.000		5.500.000	
2.07.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					12.100.000		13.310.000		14.641.000		16.105.100		16.105.100	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	12.100.000	1	13.310.000	1	14.641.000	1	16.105.100	1	16.105.100		
2.07.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.050.000		6.655.000		7.320.500		8.052.550		8.052.550		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	6.050.000	5	6.655.000	5	7.320.500	5	8.052.550	5	8.052.550		
2.07.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.050.000		6.655.000		7.320.500		8.052.550		8.052.550		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	6.050.000	5	6.655.000	5	7.320.500	5	8.052.550	5	8.052.550		
2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				696.304.320		731.822.462		743.700.000		757.410.000		804.131.000		
Terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	696.304.320	12	731.822.462	12	743.700.000	12	757.410.000	12	804.131.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	886	25		25		25		25		25			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.07.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.400.000		2.500.000		2.600.000		2.700.000		2.800.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	886	25	2.400.000	25	2.500.000	25	2.600.000	25	2.700.000	25	2.800.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				80.000.000		80.000.000		85.000.000		93.500.000		120.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	80.000.000	12	80.000.000	12	85.000.000	12	93.500.000	12	120.000.000		
2.07.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.100.000	12	1.210.000	12	1.331.000		
2.07.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				612.904.320		648.322.462		655.000.000		660.000.000		680.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	612.904.320	12	648.322.462	12	655.000.000	12	660.000.000	12	680.000.000		
2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				116.118.000		121.429.800		140.240.000		152.264.000		156.527.000		
Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	116.118.000	2	121.429.800	2	140.240.000	2	152.264.000	2	156.527.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	14	16		16		16		16		16			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	35		40		45		50		50			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	95		100		100		120		120			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2		2		2		2		2			
	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	0	5		5		5		5		5			
2.07.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
				60.000.000		60.000.000		75.000.000		80.500.000		80.500.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	14	16	60.000.000	16	60.000.000	16	75.000.000	16	80.500.000	16	80.500.000		
2.07.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
				9.000.000		9.900.000		10.890.000		11.979.000		11.979.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	1	9.000.000	1	9.900.000	1	10.890.000	1	11.979.000	1	11.979.000		
2.07.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel														
				5.000.000		5.500.000		6.050.000		6.655.000		6.655.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	35	5.000.000	40	5.500.000	45	6.050.000	50	6.655.000	50	6.655.000		
2.07.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
				20.000.000		22.000.000		22.000.000		24.200.000		25.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	95	20.000.000	100	22.000.000	100	22.000.000	120	24.200.000	120	25.000.000		
2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				19.118.000		21.029.800		23.000.000		25.300.000		28.400.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	19.118.000	3	21.029.800	3	23.000.000	3	25.300.000	3	28.400.000		
2.07.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.100.000	2	1.210.000	2	1.331.000		
2.07.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.100.000	2	1.210.000	2	1.331.000		
2.07.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	0	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.100.000	5	1.210.000	5	1.331.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				5.000.000		5.500.000		6.050.000		6.655.000		6.655.000		
Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	100	100	5.000.000	100	5.500.000	100	6.050.000	100	6.655.000	100	6.655.000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				5.000.000		5.500.000		6.050.000		6.655.000		6.655.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	0	10	5.000.000	10	5.500.000	20	6.050.000	25	6.655.000	30	6.655.000		
	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	100	1		1		1		1		1			
2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				2.500.000		3.000.000		3.050.000		3.655.000		3.655.000		
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	100	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.050.000	1	3.655.000	1	3.655.000		
2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				2.500.000		2.500.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	0	10	2.500.000	10	2.500.000	20	3.000.000	25	3.000.000	30	3.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				264.000.000		277.783.191		323.800.000		374.166.573		443.979.000		
Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	100	73	264.000.000	75	277.783.191	78	323.800.000	80	374.166.573	83	443.979.000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	1,1	6		7		8		9		10			
2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				258.000.000		272.783.191		318.300.000		368.116.573		435.993.000		
Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi kepada pencari kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	1	1	258.000.000	1	272.783.191	1	318.300.000	1	368.116.573	1	435.993.000		
	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n (Kesepakatan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	2	40		45		50		55		55			
	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Lembaga)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	0	20		20		20		20		20			
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	80	80		80		80		80		80			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				150.000.000		154.783.191		165.000.000		180.000.000		210.000.000		
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	80	80	150.000.000	80	154.783.191	80	165.000.000	80	180.000.000	80	210.000.000		
2.07.03.2.01.0002 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				5.000.000		5.000.000		10.000.000		10.000.000		12.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	12.000.000		
2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota				100.000.000		110.000.000		140.000.000		174.486.573		210.000.000		
Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	2	40	100.000.000	45	110.000.000	50	140.000.000	55	174.486.573	55	210.000.000		
2.07.03.2.01.0004 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	0	20	1.000.000	20	1.000.000	20	1.100.000	20	1.210.000	20	1.331.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.07.03.2.01.0005 - Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		
Tersedianya Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Lembaga)	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.100.000	1	1.210.000	1	1.331.000		
2.07.03.2.01.0006 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		
Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n (Kesepakatan)	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.100.000	1	1.210.000	1	1.331.000		
2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				3.000.000		2.000.000		2.200.000		2.420.000		3.993.000		
Terlaksananya pembinaan kepada lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	1	1	3.000.000	1	2.000.000	1	2.200.000	1	2.420.000	1	3.993.000		
2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				3.000.000		2.000.000		2.200.000		2.420.000		3.993.000		
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	1	1	3.000.000	1	2.000.000	1	2.200.000	1	2.420.000	1	3.993.000		
2.07.03.2.03 - Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		
Terlaksananya pendaftaran untuk Perizinan dan Lembaga pelatihan Kerja	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.100.000	1	1.210.000	1	1.331.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.07.03.2.03.0001 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		
Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.100.000	1	1.210.000	1	1.331.000		
2.07.03.2.04 - Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		
Terselesaikannya laporan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	3	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.100.000	5	1.210.000	5	1.331.000		
2.07.03.2.04.0001 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		
Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	3	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.100.000	5	1.210.000	5	1.331.000		
2.07.03.2.05 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		
Terlaksananya Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	0	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.100.000	2	1.210.000	2	1.331.000		
2.07.03.2.05.0001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		
Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	0	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.100.000	2	1.210.000	2	1.331.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				22.315.000		23.646.500		26.011.150		28.612.265		29.701.265		
Meningkatnya penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	12,55	52	22.315.000	55	23.646.500	57	26.011.150	60	28.612.265	60	29.701.265	2.07.3.32.0.00.01.000 - DINAS TENAGA KERJA DAN	
2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				9.500.000		10.450.000		11.495.000		12.644.500		12.644.500		
Terlaksananya kesempatan kerja bagi pencari kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	0	50	9.500.000	50	10.450.000	50	11.495.000	50	12.644.500	50	12.644.500		
	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	0	20		20		20		20		20			
	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	0	10		10		10		10		10			
	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	0	35		35		35		35		35			
2.07.04.2.01.0001 - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja				1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		1.331.000		
Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)	0	5	1.000.000	5	1.100.000	5	1.210.000	5	1.331.000	5	1.331.000		
2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja				1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		1.331.000		
Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	0	50	1.000.000	50	1.100.000	50	1.210.000	50	1.331.000	50	1.331.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				2.500.000		2.750.000		3.025.000		3.327.500		3.327.500		
Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	0	35	2.500.000	35	2.750.000	35	3.025.000	35	3.327.500	35	3.327.500		
2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				2.500.000		2.750.000		3.025.000		3.327.500		3.327.500		
Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)	0	10	2.500.000	10	2.750.000	10	3.025.000	10	3.327.500	10	3.327.500		
2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja				2.500.000		2.750.000		3.025.000		3.327.500		3.327.500		
Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	0	20	2.500.000	20	2.750.000	20	3.025.000	20	3.327.500	20	3.327.500		
2.07.04.2.02 - Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.000.000		2.200.000		2.420.000		2.662.000		2.662.000		
Terlaksananya penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku (Lembaga)	0	2	2.000.000	2	2.200.000	2	2.420.000	2	2.662.000	2	2.662.000		
	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi (Lembaga)	0	2		2		2		2		2			
2.07.04.2.02.0001 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi				1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		1.331.000		
Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi (Lembaga)	0	2	1.000.000	2	1.100.000	2	1.210.000	2	1.331.000	2	1.331.000		
2.07.04.2.02.0002 - Pengawasan dan Pengendalian LPTKS				1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		1.331.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku (Lembaga)	0	2	1.000.000	2	1.100.000	2	1.210.000	2	1.331.000	2	1.331.000		
2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				7.815.000		7.996.500		8.796.150		9.675.765		10.401.765		
Tersusunnya laporan pengelolaan informasi pasar kerja	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	0	2	7.815.000	2	7.996.500	2	8.796.150	2	9.675.765	2	10.401.765		
	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	5	100		100		100		100		100			
	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	0	20		20		20		20		20			
2.07.04.2.03.0001 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1.815.000		1.996.500		2.196.150		2.415.765		2.415.765		
Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	0	2	1.815.000	2	1.996.500	2	2.196.150	2	2.415.765	2	2.415.765		
2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				3.000.000		3.000.000		3.300.000		3.630.000		3.993.000		
Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	5	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.300.000	100	3.630.000	100	3.993.000		
2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja				3.000.000		3.000.000		3.300.000		3.630.000		3.993.000		
Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	0	20	3.000.000	20	3.000.000	20	3.300.000	20	3.630.000	20	3.993.000		
2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				3.000.000		3.000.000		3.300.000		3.630.000		3.993.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya perlindungan PMI (Pradan Purna Penempatan) di daerah kabupaten/kota	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	0	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.300.000	2	3.630.000	2	3.993.000		
	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	0	10		10		10		10		10			
	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	0	10		10		10		10		10			
2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		
Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	0	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.100.000	10	1.210.000	10	1.331.000		
2.07.04.2.04.0002 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		
Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	0	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.100.000	10	1.210.000	10	1.331.000		
2.07.04.2.04.0003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		
Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	0	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.100.000	2	1.210.000	2	1.331.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				103.296.000		108.116.800		160.104.322		176.114.755		190.816.976		
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	3.030	39.232	103.296.000	39.232	108.116.800	39.232	160.104.322	39.232	176.114.755	39.232	190.816.976	2.07.3.32.0.0 0.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRA SI	
2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10.058.000		10.655.000		11.720.500		12.892.550		13.387.198		
Terlaksananya pengesahan PP/PKB pada perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	0	50	10.058.000	50	10.655.000	50	11.720.500	50	12.892.550	50	13.387.198		
	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	0	32		32		32		32		32			
	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	6	2		2		2		2		2			
2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	0	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.100.000	50	1.210.000	50	1.331.000		
2.07.05.2.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan				3.008.000		3.000.000		3.300.000		3.630.000		4.003.648		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	0	32	3.008.000	32	3.000.000	32	3.300.000	32	3.630.000	32	4.003.648		
2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				6.050.000		6.655.000		7.320.500		8.052.550		8.052.550		
Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	6	2	6.050.000	2	6.655.000	2	7.320.500	2	8.052.550	2	8.052.550		
2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				93.238.000		97.461.800		148.383.822		163.222.205		177.429.778		
Terselesaikannya perusahaan yang di tangani dalam pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	0	45	93.238.000	45	97.461.800	45	148.383.822	45	163.222.205	45	177.429.778		
	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	19	20		20		20		20		20			
	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	0	30		30		30		30		30			
	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	41.030	3.100		3.100		3.100		3.100		3.100			
	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	100	25		25		25		25		25			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000		22.000.000		65.000.000		71.500.000		71.500.000		
Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	100	25	20.000.000	25	22.000.000	25	65.000.000	25	71.500.000	25	71.500.000		
2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000		26.620.000		
Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	19	20	20.000.000	20	22.000.000	20	24.200.000	20	26.620.000	20	26.620.000		
2.07.05.2.02.0003 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	0	45	1.000.000	45	1.000.000	45	1.100.000	45	1.210.000	45	1.331.000		
2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota				2.238.000		2.461.800		2.707.980		2.978.778		2.978.778		
Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	0	30	2.238.000	30	2.461.800	30	2.707.980	30	2.978.778	30	2.978.778		
2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				50.000.000		50.000.000		55.375.842		60.913.427		75.000.000		
Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	39068	3.100	50.000.000	3.100	50.000.000	3.100	55.375.842	3.100	60.913.427	3.100	75.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				78.665.000		64.640.900		118.489.990		127.838.989		138.205.814		
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				25.750.000		25.000.000		30.500.000		31.050.000		37.237.485		
Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	0	46	25.750.000	47	25.000.000	48	30.500.000	49	31.050.000	50	37.237.485	2.07.3.32.000.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
3.32.02.2.01 - Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				25.750.000		25.000.000		30.500.000		31.050.000		37.237.485		
Terlaksananya pencadangan kawasan transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi (Dokumen)	0	1	25.750.000	1	25.000.000	1	30.500.000	1	31.050.000	1	37.237.485		
	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi (Kawasan Transmigrasi)	0	1		1		1		1					
	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Hektar)	0	100		100		100		100		100			
3.32.02.2.01.0001 - Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi				20.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		
Teridentifikasinya Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dokumen)	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000		
3.32.02.2.01.0002 - Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan				1.815.000		1.500.000		1.650.000		1.815.000		2.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi (Kawasan Transmigrasi)	0	1	1.815.000	1	1.500.000	1	1.650.000	1	1.815.000		2.000.000		
3.32.02.2.01.0003 - Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi				1.815.000		1.500.000		1.650.000		1.815.000		2.415.765		
Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Hektar)	0	100	1.815.000	100	1.500.000	100	1.650.000	100	1.815.000	100	2.415.765		
3.32.02.2.01.0004 - Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				2.120.000		2.000.000		2.200.000		2.420.000		2.821.720		
Terlaksananya Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi (Dokumen)	0	1	2.120.000	1	2.000.000	1	2.200.000	1	2.420.000	1	2.821.720		
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				39.815.000		26.330.900		73.348.990		80.683.889		83.532.229		
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	0	46	39.815.000	47	26.330.900	48	73.348.990	49	80.683.889	50	83.532.229	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				39.815.000		26.330.900		73.348.990		80.683.889		83.532.229		
Tersusunnya laporan pelaksanaan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan (Lokasi)	0	1	39.815.000	1	26.330.900	1	73.348.990	1	80.683.889	1	83.532.229		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS) (Kepala Keluarga)	0	25	25	25			25	25	25				
	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Sebelum Keberangkatan (di Tingkat Desa) (Orang)	0	25	25			25	25	25	25				
	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran (KK)	0	25	25			25	25	25	25				
	Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Kabupaten Daerah Asal (KK)	0	25	25			25	25	25	25				
	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga)	0	25	25			25	25	25	25				
	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi (KK)	0	25	25			25	25	25	25				
	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan (KK)	0	25	25			25	25	25	25				
	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) (Dokumen)	0	1	1			1	1	1	1				
	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)	0	1	1			1	1	1	1				
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	5	5	5			5	5	5	5				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi (Kepala Keluarga)	0	25		25			25		25		25		
	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya (KK)	0	25		25			25		25		25		
	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya (KK)	0	25		25			25		25		25		
	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan (Kepala Keluarga)	0	25		25			25		25		25		
	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Keterampilan Spesifik) (KK)	0	25		25			25		25		25		
	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (KK)	0	25		25			25		25		25		
	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan (Orang)	0	25		25			25		25		25		
	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Orang)	0	50		50			50		50		50		
	Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran (Paket)	0	25		25			25		25		25		
3.32.03.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000		2.000.000		46.585.000		51.243.500		51.243.500		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	5	5	20.000.000	5	2.000.000	5	46.585.000	5	51.243.500	5	51.243.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.32.03.2.01.0002 - Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran				1.815.000		1.996.500		2.196.150		2.415.765		2.415.765		
Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang Telah Disiapkan	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) (Dokumen)	0	1	1.815.000	1	1.996.500	1	2.196.150	1	2.415.765	1	2.415.765		
3.32.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		2.848.340		
Terlaksananya Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS) (Kepala Keluarga)	0	25	1.000.000	25	1.000.000	25	1.100.000	25	1.210.000	25	2.848.340		
3.32.03.2.01.0004 - Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000		2.007.500		2.208.250		2.429.075		2.429.075		
Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga)	0	25	1.000.000	25	2.007.500	25	2.208.250	25	2.429.075	25	2.429.075		
3.32.03.2.01.0005 - Penyuluhan Transmigrasi				1.000.000		1.650.000		1.815.000		1.996.500		1.996.500		
Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan (Kepala Keluarga)	0	25	1.000.000	25	1.650.000	25	1.815.000	25	1.996.500	25	1.996.500		
3.32.03.2.01.0006 - Pelatihan Transmigrasi				1.000.000		1.846.900		2.031.590		2.234.749		2.234.749		
Terseleenggarakannya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Orang)	0	50	1.000.000	50	1.846.900	50	2.031.590	50	2.234.749	50	2.234.749		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.32.03.2.01.0007 - Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi				1.000.000		2.530.000		2.783.000		3.061.300		3.061.300		
Terlaksananya Penyesuaian Transmigran di Lingkungan yang Baru pada Satuan Permukiman Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi (Kepala Keluarga)	0	25	1.000.000	25	2.530.000	25	2.783.000	25	3.061.300	25	3.061.300		
3.32.03.2.01.0008 - Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat				1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		1.331.000		
Terlaksananya Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya (KK)	0	25	1.000.000	25	1.100.000	25	1.210.000	25	1.331.000	25	1.331.000		
3.32.03.2.01.0009 - Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran				1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		1.331.000		
Terlaksananya Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan (Lokasi)	0	1	1.000.000	1	1.100.000	1	1.210.000	1	1.331.000	1	1.331.000		
3.32.03.2.01.0010 - Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal				1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		1.331.000		
Terlaksananya Penyuluhan Program Transmigrasi kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan (Orang)	0	25	1.000.000	25	1.100.000	25	1.210.000	25	1.331.000	25	1.331.000		
3.32.03.2.01.0011 - Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya (KK)	0	25	1.000.000	25	1.000.000	25	1.100.000	25	1.210.000	25	1.331.000		
3.32.03.2.01.0012 - Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		
Terselenggaranya Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (KK)	0	25	1.000.000	25	1.000.000	25	1.100.000	25	1.210.000	25	1.331.000		
3.32.03.2.01.0013 - Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik)				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		
Terselenggaranya Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik)	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Keterampilan Spesifik) (KK)	0	25	1.000.000	25	1.000.000	25	1.100.000	25	1.210.000	25	1.331.000		
3.32.03.2.01.0014 - Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		
Terlaksananya Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan (KK)	0	25	1.000.000	25	1.000.000	25	1.100.000	25	1.210.000	25	1.331.000		
3.32.03.2.01.0015 - Penampungan Kabupaten/Kota				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		
Terlaksananya Layanan Penampungan Transmigran di Kabupaten Daerah Asal	Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Kabupaten Daerah Asal (KK)	0	25	1.000.000	25	1.000.000	25	1.100.000	25	1.210.000	25	1.331.000		
3.32.03.2.01.0016 - Cek Kesehatan Calon Transmigran				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		
Terlaksananya Layanan Kesehatan Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran (KK)	0	25	1.000.000	25	1.000.000	25	1.100.000	25	1.210.000	25	1.331.000		
3.32.03.2.01.0017 - Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa)				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		
Terlaksananya Penyuluhan Transmigran Sebelum Berangkat (ke Tingkat Desa)	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Sebelum Keberangkatan (di Tingkat Desa) (Orang)	0	25	1.000.000	25	1.000.000	25	1.100.000	25	1.210.000	25	1.331.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.32.03.2.01.0018 - Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		
Terlaksananya Pendampingan Dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi (KK)	0	25	1.000.000	25	1.000.000	25	1.100.000	25	1.210.000	25	1.331.000		
3.32.03.2.01.0019 - Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		
Terlaksananya Pemberian Bantuan Permodalan	Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran (Paket)	0	25	1.000.000	25	1.000.000	25	1.100.000	25	1.210.000	25	1.331.000		
3.32.03.2.01.0020 - Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		
Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.100.000	1	1.210.000	1	1.331.000		
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				13.100.000		13.310.000		14.641.000		16.105.100		17.436.100		
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	0	46	13.100.000	47	13.310.000	48	14.641.000	49	16.105.100	50	17.436.100	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
3.32.04.2.01 - Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian				13.100.000		13.310.000		14.641.000		16.105.100		17.436.100		
Terlaksananya pengembangan satuan permukiman Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	0	25	13.100.000	25	13.310.000	25	14.641.000	25	16.105.100	24	17.436.100		
	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.32.04.2.01.0001 - Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman				12.100.000		12.310.000		13.541.000		14.895.100		16.105.100		
Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	0	25	12.100.000	25	12.310.000	25	13.541.000	25	14.895.100	24	16.105.100		
3.32.04.2.01.0002 - Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		
Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.100.000	1	1.210.000	1	1.331.000		

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Perangkat Daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029. Untuk Tahun-Tahun mendatang periode pembangunan Tahun 2025-2029, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolak ukur pengukuran capaian kinerja setiap Tahun.

Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan dalam lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditetapkan untuk 5 (lima) Tahun kedepan disusun dengan mempertimbangkan:

1. Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang termuat dalam Bab IV Penetapan Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.
2. Indikator kinerja sasaran (*impact*) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.
3. Indikator kinerja program (*outcome*) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Bab IV Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Dengan demikian, indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan target sampai dengan Tahun 2030 disajikan pada tabel dibawah ini:

**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI										
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,47	3,45	3,4	3,3	3,2	3,16	3,1	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	100	0	100	100	100	100	100	
3	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	100	70	73	75	78	80	83	
4	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persentase	12,55	50	52	55	57	60	60	
5	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	41.030	39.232	39.232	39.232	39.232	39.232	39.232	
6	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Persentase	0	0	46	47	48	49	50	
7	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	Persentase	0	45	46	47	48	49	50	
8	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	Persentase	0	0	46	47	48	49	50	

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS
Pembangunan Daerah Renstra
Pemerintah Kabupaten Seruyan**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
1.	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
			2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
			2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
2.	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan Tenaga Kerja	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
			2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
3.	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI									
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	60	60	70	70	80	80	80	
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,66	68,05	68,25	68,44	68,64	68,84	69,04	
4.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	(%)	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Persentase	80	80	82	84	85	88	90	

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2.	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	komulatif	%	100	0	100	100	100	100	100	
4.	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	komulatif	%	100	70	73	75	78	80	83	
5.	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	komulatif	Persentase	12,55	50	52	55	57	60	60	
6.	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	komulatif	Orang	41.030	39.232	39.232	39.232	39.232	39.232	39.232	
7.	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										
8.	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	komulatif	Persentase	0	0	46	47	48	49	50	
9.	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	komulatif	Persentase	0	45	46	47	48	49	50	
10.	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	komulatif	Persentase	0	0	46	47	48	49	50	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk lima tahun kedepan. Dokumen ini mencerminkan komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kabupaten Seruyan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dan memperhatikan pula Visi, Misi Serta Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2025-2029.

Pelaksanaan Renstra ini akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kebijakan nasional, dinamika pembangunan daerah, serta kebutuhan organisasi. Mengingat kompleksnya tujuan yang ingin dicapai dan implementasi rancangan kegiatan yang cukup banyak, serta antisipasi tantangan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian kedepan yang semakin kuat dan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi, maka adanya saran dan masukan dari para pihak terkait, sangat diharapkan.

Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 ini, diharapkan seluruh jajaran Disnakertrans dapat menjadikannya sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja tahunan, serta dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal. Akhirnya diharapkan Renstra ini dapat dijadikan alat bantu yang terukur bagi rujukan proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi tujuan dalam kurun waktu 2025-2029 Pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Kabupaten Seruyan.